

Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Kampung Tobati di Kota Jayapura Provinsi Papua

Elsye Henni Watopa^{1*}, Alfitri², Andrias Lionardo³

^{1,2,3}Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia

Abstrak

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan dalam UUD 1945 menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan, keluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Undang-undang Otonomi Khusus dinilai sebagai suatu kebijakan yang bersifat strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Kota Jayapura merupakan Ibu Kota Provinsi yang menerima bantuan dana otsus dan di dalam Wilayah Pemerintahan Kota Jayapura terdapat Kampung Tobati yang merupakan salah satu kampung penerima dana otsus. Tujuannya bagaimana kebijakan otonomi khusus dalam peningkatan ekonomi masyarakat Kampung Tobati. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan teori Edward III. Hasilnya Kebijakan Otonomi Khusus terimplementasi dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kampung Tobati, sumberdaya paling berpengaruh dalam peningkatan ekonomi masyarakat Kampung Tobati.

Kata kunci : Kebijakan Otonomi Khusus; Implementasi; Peningkatan Kesejahteraan.

Copyright (c) 2022 Elsy Henni Watopa

✉Corresponding author :

Email Address : elsyeelsyee123@gmail.com

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan dalam UUD 1945 menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan keleluasaan pada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah (Abdullah, 2011). Pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan menekankan prinsip-prinsip demokrasi (Fachrudin, 2016). Otonomi menjadi penting yang tidak dapat dihindari dengan negeri yang mempunyai luas wilayah, penduduk yang banyak, pulau terbanyak dan suku yang beraneka ragam seperti Indonesia. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang merupakan pengganti UU No.22 Tahun 1999 menjelaskan bahwa Otonomi sendiri dapat diartikan sebagai pemberian hak, wewenang, dan kewajiban kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Baharuddin, 2019). Melalui UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang pertimbangan Keuangan antaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi serta Kabupaten/Kota (Karim, 2019).

Dengan melihat baik dan jelas tentang proposi keuangan daerah dalam susunan penyelenggaraan otonomi daerah secara luas dan nyata serta bertanggung jawab,

sebab jika dilihat dari pengalaman Orde Baru (Ikhwan, 2005). Pendekatan sentralisasinya ternyata tidak mampu membendung gejolak daerah-daerah yang menginginkan keadilan antara pusat dengan daerah. Melalui pendekatan *top down* tersebut setiap daerah di Indonesia hanya bisa memajukan daerahnya dengan mengikuti segala aturan yang diberikan oleh pemerintah pusat (Katharina, 2016). Daerah tidak dapat menggali potensi yang dimilikinya guna memajukan dan mensejahterakan masyarakat daerahnya. Provinsi Papua mendapatkan dana otonomi khusus yang ditetapkan dalam APBN melalui Peraturan Gubernur dan dibuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Perekonomian dalam sebuah wilayah merupakan suatu hal yang penting dalam maju dan tidaknya suatu wilayah tersebut (Winarno, 2008). Undang-undang Otonomi Khusus menyatakan bahwa meningkatnya pembangunan suatu wilayah dipengaruhi oleh peningkatan ekonomi. Dalam UU Otsus juga menyatakan bahwa peningkatan kesejahteraan juga melalui bidang ekonomi yang telah di atur melalui Peraturan Gubernur. Pemerintah Kota Jayapura merupakan salah satu wilayah yang mengatur, merencanakan dan menggunakan dana otsus. Kota Jayapura adalah ibu Kota Provinsis Papua dan menjadi pusat sentral pembangunan Provinsi Papua. Alokasi Dana Otsus yang diberikan kepada Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor: 11 Tahun 2017 bahwa 80% ke Kabupaten/Kota dan 20% ke Provinsi.

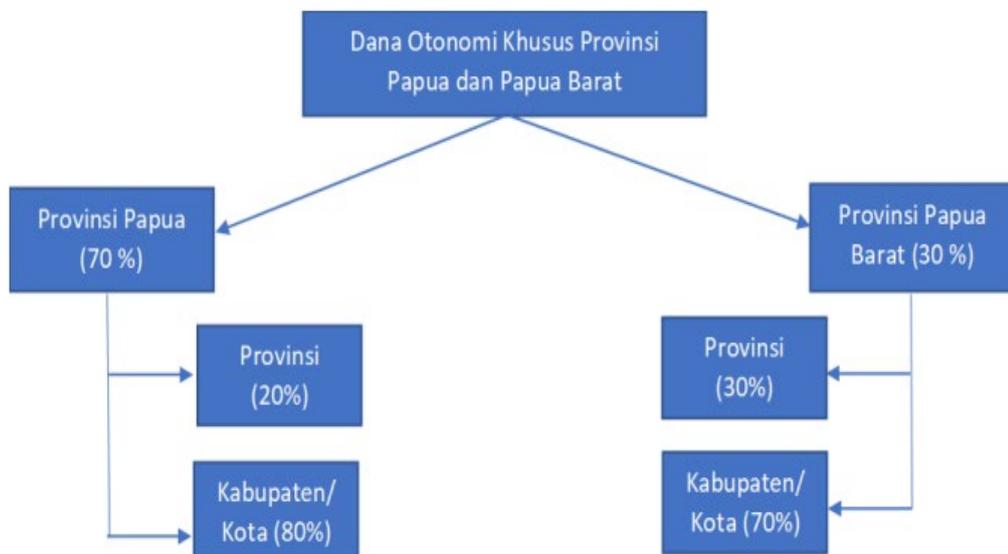
Pemerintah Kota Jayapura melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Bidang Ekonomi terdapat di dalamnya Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Ketahanan Pangan, dan Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UMKM yang menerima alokasi dana Otsus untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Jayapura. Bantuan kegiatan yang diberikan kepada masyarakat kampung Tobati untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi, sehingga Peneliti ingin melakukan pengamatan untuk melihat implementasi kebijakan otsus dari pemerintah yang lebih tinggi yang mempunyai kekuasaan, kepada pemerintah yang lebih rendah derajatnya, menyangkut bidang legislatif atau administratif (Grindle, 1980). Dalam studi desentralisasi, praktik desentralisasi terbagi atas dua bentuk utama, yaitu desentralisasi politik dan desentralisasi administrasi (Alfitri, 2004). Penerapan desentralisasi politik diharapkan sebagai upaya untuk mencegah pembuatan keputusan secara sentralistik dan mengurangi dominasi pemerintah pusat dalam keputusan politik di daerah, memperluas otonomi di daerah dan sebagai strategi untuk menciptakan stabilitas politik (Altianua, 2018).

Desentralisasi merupakan tindakan pendemokrasian agar rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam mempergunakan hak-hak demokrasi. Sementara, desentralisasi administratif dimaksudkan untuk mewujudkan efisiensi dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan (Alfitri, 2007). Pengelolaan merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, petunjuk, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan program pembangunan pada organisasi pemerintah maupun organisasi swasta agar semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik (Sulasmini dkk, 2021). Selama ini otonomi khusus sudah berjalan kurang lebih 20 tahun dan peneliti mengamati penelitian ini dari tahun 2018-2020. Penelitian ini ingin mengimplementasikan kebijakan otonomi khusus dan faktor yang memberikan dampak terhadap implementasi kebijakan otonomi khusus di Kampung Tobati.

Proses implementasi kebijakan publik, yaitu implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, dan biasanya dalam bentuk Undang-Undang. Namun, dapat juga berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif penting atau keputusan badan peradilan. Biasanya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan yang dicapai dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya. Proses ini berlangsung setelah sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksana, kesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran, dampak nyata baik yang dikehendaki atau yang tidak (Oktarezki dkk, 2021). Dari output tersebut dampak keputusan sebagaimana dipersepsikan oleh badan-badan yang mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting (atau upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan) terhadap undang-undang/peraturan yang bersangkutan.

Otonomi Khusus Daerah Papua di Indonesia Otonomi Khusus disini berasal dari konsep desentralisasi yang merupakan bagian dari sistem pemerintahan. Melalui konteks ini Parsons mendefinisikan desentralisasi sebagai pembagian (sharing) kekuasaan pemerintahan antara kelompok pemegang kekuasaan di pusat dengan kelompok-kelompok lainnya agar masing-masing kelompok memiliki otoritas untuk mengatur bidang-bidang tertentu dalam lingkup teritorial suatu negara (Moenir, 1998). Memaknai desentralisasi adalah *"the process of decentralization denotes the transference of authority, legislative or administrative, from a higher level of government to a lower"* (Grindle, 1980).

UU Otonomi Khusus merupakan aturan atau sebuah kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat untuk menyamaratakan atau menyamakan Provinsi Papua dengan daerah lain yang ada di dalam Wilayah NKRI namun pada tidak berjalan secara baik. Berdasarkan Perdasus No.13 Tahun 2016, pada Provinsi Papua terdapat pembagian sebesar 20 persen dari total dana otonomi khusus untuk Provinsi Papua yang diperuntukkan bagi pemerintah provinsi, dan terdapat 80 persen dana otonomi khusus yang diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota.



Gambar 1. Alur & Persentase Pembagian Dana Otsus Antara Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota

METHODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono, 2014). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan pada penelitian ini dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi (gabungan) yaitu wawancara dengan informan, turun ke Kampung Tobati sebagai lokus penelitian untuk melakukan observasi dan mendokumentasikan hasil penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, metode ini digunakan karena peneliti ingin mengungkap permasalahan yang sifatnya aktual dan faktual, juga bertujuan untuk mengungkap dan menggambarkan gejala-gejala sosial yang berkaitan dengan fokus masalah dalam (Moleong, 2006) penelitian yaitu implementasi kebijakan otonomi khusus Provinsi Papua dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kampung Tobati.

1. Teknik keabsahan data

Teknik keabsahan data dalam metode penelitian kualitatif merupakan salah satu bagian yang sangat penting untuk mengetahui derajat kepercayaan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten sehingga menjadi suatu data yang valid dan dapat di pertanggung jawabkan. Untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua macam Triangulasi meliputi:

- 1) Triangulasi Teknik; dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan pengecekan informasi terhadap suatu hal yang sama dengan menggunakan teknik berbeda (wawancara mendalam, Observasi dan studi dokumentasi).
- 2) Triangulasi Sumber; dalam penelitian ini, triangulasi sumber dilakukan dengan wawancara pada satu informan dengan informan yang lain menggunakan pedoman wawancara yang sama.

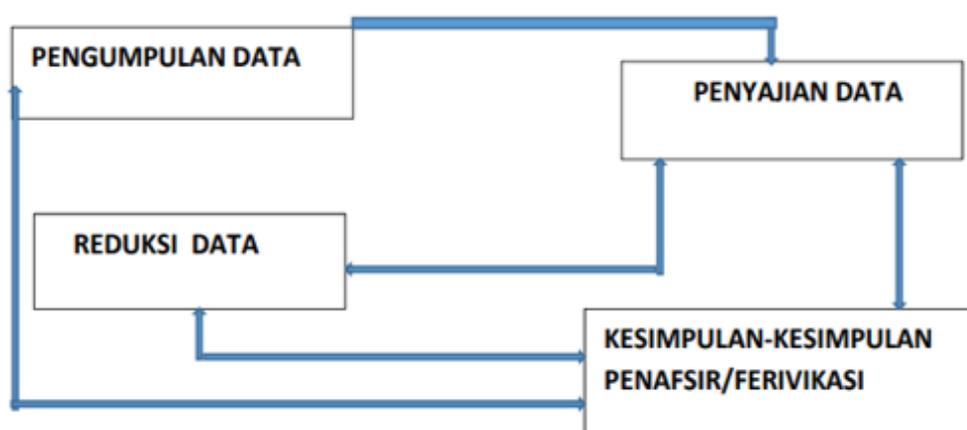
2. Pemilihan inforfman

Setelah ditetapkan lokasi penelitian, berikutnya dipilih informan sebagai subjek penelitian. Penetapan informan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu peneliti menetapkan informan berdasarkan anggapan bahwa informan dapat memberikan informasi yang diinginkan penelitian sesuai dengan permasalahan penelitian. Dengan kata lain informan yang dipilih adalah informan kunci (*key informan*) yang baik pengetahuan maupun keterlibatan mereka dengan permasalahan yang akan diteliti tidak diragukan lagi. Pihak yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Key Informan atau disebut informan kunci adalah Kepala Kampung Tobati (Pemimpin di Kampung Tobati, orang yang mengetahui situasi permasalahan masyarakat yang dipimpin).
- 2) Informan utama Terdiri dari Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Sekretaris Dinas Pariwisata, Sekretaris Dinas Perindagkop, Kabag Industri Peridagkop, Kabag Bidang Ekonomi Bappeda, Kasubag Program dan Pelaporan Dinas Perikanan (merupakan Dinas yang mengelolah dana otsus di bidang ekonomi).
- 3) Informan tambahan terdiri dari 1 1 Orang Masyarakat Kampung Tobati (menggunkan satu orang masyarakat kampung tobati karena kepala kampung adalah orang tobati, Kepala Bidang Industri adalah Orang Tobati), Sekretaris Dinas Badan Pemberdayaan dan Masyarakat Kampung dan Kasubag Program dan Pelaporan Dinas Sosial (merupakan dinas yang juga mengetahui dan mengelolah dana otsus).

3. Teknik pengumpulan dan analisis data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *Library research* (penelitian kepustakaan), *Field Work Research* (penelitian lapangan). Sesuai dengan jenis penelitian ini yang merupakan penelitian kualitatif, maka teknik analisis data yang digunakan ialah analisis kualitatif. Dalam hal ini metode atau teknik analisis data yang digunakan ialah model analisis interaktif (Miles & Huberman, 1992). Bertatap muka dengan Informan dengan sistem wawancara.



Gambar 2. Analisis model interaktif (Miles & Huberman, 1992)

4. Triangulasi Data

Triangulasi data merupakan salah satu pendekatan yang dilakukan peneliti untuk menggali dan melakukan teknik pengolahan data kualitatif (Sugiyono, 2014). Teknik triangulasi bisa diibaratkan sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Dalam teknik pengolahan data kualitatif, instrumen terpenting adalah dari peneliti itu sendiri. Melalui hal tersebut, maka kualitas penelitian kualitatif sangat bergantung dari seorang peneliti. Ketika seorang peneliti memiliki banyak pengalaman dalam melakukan penelitian atau riset maka semakin lebih peka juga terhadap penggalian data serta gejala atau fenomena yang diteliti. Terlepas dari apapun aktivitasnya yang dilakukan oleh peneliti, pastinya selalu diwarnai dengan sudut pandang subjektivitas peneliti. Akan tetapi, hal ini harus dihindari oleh seorang peneliti karena sebisa

mungkin setiap peneliti haruslah berusaha untuk semaksimal mungkin bersikap netral dalam penelitiannya sehingga kebenaran yang diperoleh menjadi sebuah kebenaran yang valid atau ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti telah lakukan dan digabungkan teori Edward III menjelaskan bahwa komunikasi yang dibangun selama ini dalam mengimplementasikan kebijakan otonomi khusus sudah berjalan dengan optimal, baik dari pembuat kebijakan, kepada pelaksana dan target yaitu dari pemerintah kepada masyarakat (Karim, 2020). Transformasi, kejelasan dan konsistensi dalam komunikasi tentang otonomi khusus sudah tepat sasaran atau sudah terimplementasikan. Artinya bahwa komunikasi dalam kebijakan otonomi khusus untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi sudah dikomunikasikan dengan baik. Dana otsus yang digunakan selama ini dikomunikasikan dari pusat dengan jumlah mata anggaran (Karim dkk, 2022) yang diberikan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten Kota dengan jumlah pemberian 20% ke Provinsi dan 80% ke Kabupaten Kota.

Tabel 1. Jumlah penduduk berdasarkan usia sekolah

SD	SMP	SMA	PT	Tidak/ belum sekolah	Jumlah
106	65	52	70	60	353

Sumber: Hasil data olahan, 2022.

Kampung Tobati yang merupakan bagian dari Kota Jayapura juga mendapat bagian dari dana otsus dan sudah dilaksanakan melalui komunikasi antara pemerintah Kota Jayapura dan Kepala Kampung serta anggotanya melalui rapat koordinasi, musrembang, turunnya Walikota, Wakil Walikota, Staf ahli dan beberapa Dinas terkait. Untuk melihat secara langsung hasil dari penggunaan dana otsus di Kampung Tobati dengan terlibat secara langsung dalam kegiatan tersebut. Sehingga benar target yang ditunjukkan untuk melaksanakan kegiatan dari dana otsus telah dilaksanakan oleh masyarakat kampung Tobati. Tujuan utama dari komunikasi adalah apa yang diinformasikan dapat tersampaikan dengan baik dan hal inilah yang telah dilakukan pemerintah Kota Jayapura kepada masyarakat Kampung Tobati dengan mampu memberikan informasi dan kejelasan secara transparan kepada masyarakat kampung Tobati sebagai target penerima bantuan dana otsus lewat kebijakan yang ada, namun dalam kegiatan musrembang kampung, kegiatan yang diusulkan tidak terlalu banyak sebab Kampung Tobati tidak saja menerima bantuan kegiatan dari dana otsus namun ada juga bantuan Dana Desa (Karim dkk, 2021).

Sumber Daya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat kampung Tobati, salah satu sifat sangat di perlukan adalah sumberdaya, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa sumber daya yang merupakan bagian dari teori Edward III sudah terimplementasikan kepada

masyarakat. Sumberdaya memiliki peran penting, hal ini dapat dilihat dari sumberdaya manusia masyarakat Tobati yang cukup baik. Sumberdaya anggaran yang digunakan dalam bentuk kegiatan (Sari dkk, 2018) juga menunjukkan tepat sasaran. Harapan dari kepala kampung untuk menggunakan kewenangan sebagaimana mestinya dalam tanggungjawab yang diemban juga cukup baik dapat dilihat dari hasil pendapatan yang didapat cukup tinggi salah satunya melalui hasil penelitian masyarakat kampung Tobati yang memiliki hak ulayat daerah wisata ketika masyarakat diberikan bantuan melalui pembangunan WC dan Gapura yang menjadi fasilitas utama bagi pengunjung dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga memiliki hasil pendapatan yang tinggi dan dengan bantuan tanaman hidroponik juga membantu masyarakat untuk tidak lagi menggunakan dua kali transport lain dan darat untuk pergi ke pasar, namun dengan adanya tanaman hidroponik membantu menghemat biaya.

Tabel 2. Pekerjaan masyarakat Kampung Tobati

No	Nelayan	ASN	TNI / Polri	Swasta	Pensiunan
1	30 orang	29 orang	5 orang	20 orang	4 orang

Sumber: Hasil data olahan, 2022.

Untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi sangat diperlukan sumberdaya, baik itu sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran dan juga sumberdaya fasilitas. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan pendapatan yang dimiliki dari masyarakat kampung Tobati, melalui bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kota Jayapura, pemanfaatan sumberdaya yang baik dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, khusus kampung Tobati, sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran dan sumberdaya fasilitas sangat berkaitan satu sama lain. Masyarakat kampung Tobati sudah memiliki sumberdaya manusia yang baik, mereka mampu memanfaatkannya dengan baik sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa masyarakat kampung Tobati mampu meningkatkan ekonominya dengan memanfaatkan sumberdaya yang mereka miliki melalui bantuan dan otsus dan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Jayapura dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kampung Tobati. Kebijakan dapat dilihat dari sumberdaya manusia masyarakat Tobati yang cukup baik (Surtina dkk, 2021), sumberdaya anggaran yang digunakan dalam bentuk kegiatan juga menunjukkan tepat sasaran. Harapan dari kepala kampung untuk menggunakan kewenangan sebagaimana mestinya dalam tanggungjawab yang diemban juga cukup baik. Hasil pendapatan yang didapat cukup tinggi salah satunya melalui hasil penelitian masyarakat kampung Tobati yang memiliki hak ulayat daerah wisata ketika masyarakat diberikan bantuan melalui pembangunan WC dan Gapura yang menjadi fasilitas utama bagi pengunjung dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga memiliki hasil pendapatan yang tinggi dan dengan bantuan tanaman hidroponik juga membantu masyarakat untuk tidak lagi menggunakan dua kali transport lain dan darat untuk pergi ke pasar, namun dengan adanya tanaman hidroponik membantu menghemat biaya.

Peningkatan kesejahteraan ekonomi sangat diperlukan sumberdaya, baik itu sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran dan juga sumberdaya fasilitas, hal ini dapat dilihat dari peningkatan pendapatan yang di miliki dari masyarakat kampung Tobati, melalui bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kota Jayapura. Pemanfaatan sumberdaya yang baik dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, khusus kampung tobati, sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran dan sumberdaya fasilitas sangat berkaitan satu sama lain, saat masyarakat kampung tobati sudah memiliki sumberdaya manusia yang baik, mereka mampu memanfaatkannya dengan baik sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa masyarakat kampung tobati mampu meningkatkan ekonominya dengan memanfaatkan sumberdaya yang mereka miliki melalui bantuan dan otsus dan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Jayapura.

Kegiatan pelaksanaan diposisi yang dilakukan terkait dengan otonomi khusus semua dapat berjalan dengan baik, walaupun ada yang bersifat keagamaan, namun dalam peningkatan perekonomian ekonomi (Karim, 2019) masyarakat kampung tobati sudah berjalan dengan baik. Sesuai dengan tujuan otonomi khusus walaupun tidak secara keseluruhan. Kepala kampung memegang komitmen sebagai orang tertinggi atau wakil dari pemerintah dapat terpilih kembali menjadi kepala kampung. Adanya kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada kepala kampung dan apa yang dikerjakan oleh kepala kampung memberikan dampak positif terhadap masyarakat kampung Tobati, kepala kampung juga mampu mendorong anak-anak muda dalam mengikuti ajang nasional yang dibuat melalui pemilihan Putri Indonesia, Putri Pariwisata, semua yang merupakan bagian tanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan otsus telah dilaksanakan dengan baik. Sehingga mampu memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan ekonomi mereka terutama dalam wawasan masyarakat sesuai dengan bagian yang dimiliki oleh masyarakat Kampung Tobati, namun dalam pembagian kegiatan otsus tidak berfokus kepada Kampung Tobati, melainkan 13 Kampung yang menjadi bagian dari otonomi khusus.

Birokrasi dari pernyataan hasil wawancara penelitian dan dikaitkan dengan teori Edward III, maka yang Imptinya, Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana (implementors) mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mempunyai keinginan untuk melakukannya, namun Edward III (Widodo, 2010) menyatakan bahwa "implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi". Jadi dapat dikatakan bahwa birokrasi yang digunakan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat kampung Tobati melalui SOP dan fragmentasi menunjukkan bahwa SOP yang digunakan berjalan dengan semestinya, di mana masyarakat Kampung Tobati sebagai sasaran yang dituju menerima dan melakukan kebijakan otonomi khusus melalui bantuan dan kegiatan, begitu juga dengan fragmentasi/koordinasi yang dilakukan berdasarkan tanggung jawab yang diberikan baik kepada pelaksana dan penerima. Dari hasil penelitian, yang peneliti lakukan, menunjukkan bahwa birokrasi Pemerintah Kota Jayapura mampu mendukung jalannya otonomi khusus dengan terlibat secara langsung dalam pengawasan kegiatan otonomi khusus di Kampung Tobati, dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa pemberian bantuan otsus diberikan langsung kepada masyarakat Kampung Tobati yang merupakan orang asli Papua.

SIMPULAN

Komunikasi yang dibangun selama ini dalam mengimplementasikan kebijakan otonomi khusus sudah berjalan dengan optimal, baik dari pembuat kebijakan, kepada pelaksana dan target. Transformasi, kejelasan dan konsistensi dalam komunikasi sudah tepat sasaran. Artinya bahwa komunikasi dalam kebijakan otonomi khusus untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi sudah dikomunikasikan dengan baik. Sehingga dapat dikatakan bahwa komunikasi sudah berhasil dalam mengimplmentasikan kebijakan otonomi untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kampung Tobati. Untuk mencapai tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat kampung Tobati, salah satu sifat sangat di perlukan adalah sumberdaya, dari hasil wawancara peneliti dan informan menunjukkan bahwa sumber daya memiliki peran penting dapat dilihat dari sumberdaya manusia masyarakat tobati yang cukup baik dimana sudah banyak masyarakat kampung tobati sudah memiliki tingkat pendidikan yang baik hampir mencapai 70% dilihat dari PNS dan POLRI/TNI, juga terpilihnya Putri Pariwisata dari Kampung Tobati mewakili Provinsi Papua, sumberdaya anggaran yang digunakan dalam bentuk kegiatan juga menunjukkan tepat sasaran, harapan-harapan dari kepala kampung untuk menggunakan kewenangan sebagaimana mestinya dalam tanggung jawab yang diemban juga cukup baik dapat dilihat dari hasil pendapatan yang didapat cukup tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Sumber Daya Manusia masyarakat kampung Tobati mampu meningkatkan perekonomian masyarakat amat terlebih dengan kebijakn otonomi khusus. Sumber daya merupakan dimensi yang paling berdampak dalam meningkatkan kesejhteraan ekonomi masyarakat kampung tobati, karena terjadi peningkatan melalui dana otsus dalam tiga tahun pemberian dana otonomi khusus.

Referensi :

- Abdullah, H. R. (2011). *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerahsecara Langsung*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
- Alfitri, A. (2004). Pengenalan Masyarakat Marginal.
- Alfitri, A. (2007). Budaya Konsumerisme Masyarakat Perkotaan. *Empirika Fisip Unsri*, 11(1), 1-10.
- Altianua, U. (2018). Implementasi Otonomi Khusus Provinsi Papua Dalam Ketahanan Wilayah Nkri Di Kabupaten Mikan (Studi Pada Pengembangan Dana Desa Distri Jila 2016-2017).
- Baharuddin, T. (2019). *Kebijakan Sosial Dan Otonomi Daerah*. Jakarta. Indonesia.
- Edwards Iii George C. (1980). *Implementating Publik Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press.
- Fachruddin. (2016). *Membangun Otonomi Daerah Memperkuat Nkri*, Tangerang Selatan: Serat Alam Media.
- Grindle, Merilee S. (1980). *Politics And Apolicy Implementation In The Third Word*. New Jersey: Princetown University.
- Ikhwan, Abidin Basri. (2005). *Islam Dan Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Karim, A. (2019). Peningkatan Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). *Nas Media Pustaka, Makassar*.
- Karim, A. (2019, March). The Effect Of" Axis Hits Bonus" Version Tagline Advertising And Ambassador Brand Against Axis Cards Awareness. In *First International Conference On Materials Engineering And Management-Management Section (Icmemm 2018)* (Pp. 63-66). Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/Icmemm-18.2019.13>

- Karim, A. (2020). Kenapa Harus Desa Jadi Penunjang Utama Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemic Global (Covid-19).
- Karim, A., Musa, C. I., Sahabuddin, R., & Azis, M. (2021). The Increase Of Rural Economy At Baraka Sub-District Through Village Funds. *The Winners*, 22(1), 89-95. <https://doi.org/10.21512/Tw.V22i1.7013>
- Karim, A., Syamsuddin, I., Jumarding, A., & Amrullah, A. (2022). The Effect Of Gender Independence And Leadership Style On Audit Quality In Makassar Public Accounting Offices. *International Journal Of Social Science Research And Review*, 5(7), 114-126. <https://doi.org/10.47814/Ijssrr.V5i7.341>
- Katharina, R. (2016). Upaya Mewujudkan Good Governance Dalam Pelaksanaan Otonomi Khusus Di Provinsi Papua. *Kajian*, 18(2), 191-217.
- Majelis Rakyat Papua. (2020). Efektivitas Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Papua Selama 20 Tahun Terakhir Dalam Berbagai Bidang Kehidupan.
- Majelis Rakyat Papua. (2020). Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Papua.
- Majelis Rakyat Papua. (2021). Resfleksi Majelis Rakyat Papua Tentang 20 Tahun Otonomi Khusus Papua.
- Miles., & Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moenir, H.A.S. (1998). *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*. Jakarta: Bumo Aksara.
- Moleong, Lexy. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Oktarezki, A., Alfitri, A., & Abror, M. Y. (2021). *Kepentingan Amerika Serikat Sebagai Mediator Krisis Diplomatik Antara Negara-Negara Arab Dengan Negara Qatar Tahun 2017* (Doctoral Dissertation, Sriwijaya University).
- Sari, H. R., Lionardo, A., & Effendi, S. (2018). *Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Majatra Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin Tahun 2016* (Doctoral Dissertation, Sriwijaya University).
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sulasmini, S., Alfitri, A., & Nugraheni, D. H. E. (2021). *Program Pembinaan Ukm Keripik Singkong Oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Sebagai Usaha Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Kelompok Pkk Dusun Purwodono Desa Batumarta Ii Kec. Lubuk Raja Kab. Oku Sumatera Selatan)* (Doctoral Dissertation, Sriwijaya University).
- Surtina, S., Mahriani, R., & Musdalifah, F. S. (2021). *Analisis Proses Social Penetration Mahasiswa Baru Dalam Organisasi* (Doctoral Dissertation, Sriwijaya University).
- Winarno, Budi. (2008). *Kebijakan Publik*. Pt. Buku Kita: Jakarta